

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan ekonomi oleh Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fatmawati & Iskandar, 2018; Ardiansyah, dkk., 2018). Faraha, dkk. (2018), menambahkan bahwa Salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh program pembangunan nasional adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperluas landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi pada dasarnya sama dengan pembangunan nasional secara keseluruhan, karena yang menjadi permasalahannya sama yaitu mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan sebagainya.

Kebijakan perluasan kesempatan kerja merupakan suatu kebijakan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu negara atau bangsa adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan ekonomi. Dalam rangka mengembangkan daerah, dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, maka daerah akan mengembangkan sektor-sektor perekonomian sesuai dengan keunggulannya Keunggulan sektor ekonomi daerah, dikarenakan sektor tersebut mempunyai permintaan nasional atau

ekspor yang tinggi. Hal itu dapat terjadi apabila biaya produksi rendah, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam perekonomian yang lebih luas. Daya saing suatu daerah akan terlihat melalui proses perdagangan antar daerah (inter-regional) maupun internasional. Dalam jangka panjang sektor-sektor yang memiliki daya saing akan menjadi spesialisasi daerah.

Tenaga kerja menjadi faktor yang sangat penting dalam proses produksi. Tanpa adanya tenaga kerja, proses produksi tidak bisa berjalan dengan lancar. Namun di sisi lain, tenaga kerja bisa menimbulkan berbagai masalah, antara lain jumlah pengangguran tinggi, jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat, mutu tenaga kerja yang rendah, dan lain sebagainya. Masalah tersebut menjadi salah satu penghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kondisi tenaga kerja beserta masalah dan upaya mengatasinya, Menurut UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja.

Struktur ekonomi suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari komposisi produk regional menurut sektor-sektor perekonomian. Banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja. Dengan demikian proporsi pekerja menurut lapangan

pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja.

Untuk mengurangi permasalahan tenaga kerja pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu tujuan pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas angkatan kerja dan mengarahkan pendapatan yang merata yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Tujuan inti dari proses pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010). Ironisnya proses pembangunan ekonomi dimana peningkatan atau kenaikan upah justru berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian tersebut ternyata bertentangan dengan penelitian lainnya yang mengungkapkan adanya hubungan yang positif antara upah dan penyerapan tenaga kerja (Wihastuti, dan Rahmatullah, 2018: 97)

Menurut Hartono dkk., (2018) upah berkaitan erat dengan tenaga kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja menjadi pertimbangan pengusaha dalam menempatkan pekerja. Penyerapan kerja yang lebih kecil dari penawaran tenaga kerja akan menyisakan pengangguran. Upah minimum yang diterapkan menjadi bagian dari bahan pertimbangan tenaga kerja dalam penawaran tenaga kerja. Mirdad dan Akhbar (2018: 253) menegaskan bahwa suatu perusahaan akan melakukan penyesuaian penggunaan tenaga kerja

tergantung dari tingkat upahnya. Jika upah mengalami penurunan, maka perusahaan akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sebaliknya, bila upah mengalami kenaikan, maka perusahaan tidak akan menambah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan bahkan, bisa saja mengurangi tenaga kerja yang ada.

Pertumbuhan ekonomi dalam system pemerintahan daerah biasanya di indikasikan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila PDRB naik maka penyerapan tenaga kerja meningkat, karena tenaga kerja berperan penting terhadap kenaikan output produksi semakin banyak tenaga kerja yang digunakan proses produksi akan meningkatkan nilai output produksi. Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat (Ardiansyah dkk., 2018: 297).

Keberhasilan dalam penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi pendidikan. Menurut Hartono dkk (2018: 42) karyawan yang berpendidikan tinggi akan mengharapkan upah yang lebih tinggi, karena produktifitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Oleh karena itu perusahaan akan lebih memilih menyerap tenaga kerja yang berpendidikan tinggi agar produktifitas dalam menghasilkan barang dan jasa akan menjadi lebih tinggi.

Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo merupakan kabupaten yang memiliki potensi struktur perekonomian cukup baik. Keduanya terletak berbatasan langsung dengan kotamadya Surakarta. Selain lokasi strategis,

Karanganyar maupun Sukoharjo memiliki keuntungan dalam pengembangan sebagai kota industri, dimana Karanganyar memiliki industry-industri besar di daerah Mojosongo, sementara Sukoharjo memiliki industry-industri besar di daerah Kartasura. Pada upaya mengembangkan struktur ekonomi, Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo, harus dapat mengalokasikan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat. Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009 hingga tahun 2017 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009-2017

Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja (%)	
	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Sukoharjo
2009	0,917	0,917
2010	0,934	0,926
2011	0,942	0,937
2012	0,942	0,939
2013	0,962	0,940
2014	0,925	0,954
2015	0,964	0,955
2016	0,968	0,977
2017	0,977	0,972

Penyerapan tenaga kerja dihitung berdasarkan data jumlah tenaga kerja yang telah bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Artinya dari total angkatan kerja yang ada, tenaga kerja yang bekerja merupakan tenaga yang diserap memperoleh pekerjaan. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2009 di kedua kabupaten. Kabupaten karanganyar pada tahun 2017 penyerapan tenaga kerjanya meningkat, dari 0,968 menjadi 0,977, sementara

penyerapan tenaga kerja di kabupaten Sukoharjo menurun. Kondisi tingkat penyerapan tenaga kerja kedua kabupaten tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut.



Gambar 1.1 Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009-2017

Pada dinamika penyerapan tenaga kerja di kabupaten karanyanyar dari tahun 2009 hingga 2013 cenderung meningkat dan diatas persentasi penyerapan tenaga kerja di kabupaten Sukoharjo. Namun pada tahun 2014, ada fenomena menarik dimana penyerapan tenaga kerja di Kabupaten karanganyar menurun drastis, bahkan dibawah kabupaten Sukoharjo. Hal inilah yang menjadi daya tarik untuk mengangkat tema untuk penelitian saat ini,

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, ada hal menarik untuk diteliti. Adapun penelitian ini, judulnya adalah Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar ditinjau dari Upah Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Berapa besar penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan faktor Upah Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendidikan?
2. Berapa besar penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karanganyar berdasarkan faktor Upah Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendidikan?
3. Berapa besar perbedaan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo dengan Karanganyar ditinjau dari berdasarkan Upah Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Menghitung dan menganalisis besar penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan faktor Upah Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendidikan.
2. Menghitung dan menganalisis besar penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karanganyar berdasarkan faktor Upah Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendidikan.
3. Mengetahui perbedaan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo dengan Karanganyar ditinjau dari berdasarkan Upah Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan tenaga kerja yaitu pengaruh upah minimum regional, produk domestik regional bruto dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Peneliti memperoleh pengetahuan praktis terkait ilmu ekonomi sumber daya manusia.
- 2) Dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memahami kondisi ketenagakerjaan provinsi yang ada di Jawa Tengah, khususnya berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, serta sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dalam merumuskan perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan terutama dalam kaitanya dengan penyerapan tenaga kerja.

c. Bagi akademisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembaca sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.